BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif dan analisis verifikatif. Analisis deskriptif yang dilakukan dalam penelitian ini adalah nilai maksimum dan minimum dari setiap variabel yang diteliti dengan tujuan mengetahui perkembangan masing-masing variabel pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Purwakarta periode tahun 2015 sampai dengan tahun 2017. Sedangkan analisis verifikatif digunakan untuk mengetahui besarnya hubungan dan pengaruh langsung dari faktor eksternal dan internal yang meliputi Pajak Penghasilan Orang Pribadi (Y) dipengaruhi oleh Penghasilan Tidak Kena Pajak (X_1) dan Pemeriksaan Pajak (X_2).

4.1.1 Hasil Analisis Deskriptif

Untuk mengetahui gambaran mengenai setiap variabel yang diteliti yakni Penghasilan Tidak Kena Pajak, Pemeriksaan Pajak dan Pajak Penghasilan Orang Pribadi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Purwakarta, maka terlebih dahulu dilakukan analisis deskriptif.

4.1.1.1 Analisis Deskriptif Penghasilan Tidak Kena Pajak

Menurut Djoko Muljono (2009:191) definisi penghasilan tidak kena pajak adalah Sebagai batasan penghasilan bagi wajib pajak orang pribadi yang menentukan perlu tidaknya atas penghasilan wajib pajak perseorangan dikenakan

pajak penghasilan. Adapun Indikator Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) adalah besaran penghasilan tidak kena pajak.

Dibawah ini hasil pengolahan data dari perhitungan Penghasilan Tidak Kena Pajak yang diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Purwakarta pada periode tahun 2015-2017 sebagai berikut:

Tabel 4.1
Penghasilan Tidak Kena Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Purwakarta Periode 2015-2017

NO	BULAN	TAHUN		
		2015	2016	2017
1.	Januari	3.000.000	4.500.000	4.500.000
2.	Februari	3.000.000	4.500.000	4.500.000
3.	Maret	3.000.000	4.500.000	4.500.000
4.	April	3.000.000	4.500.000	4.500.000
5.	Mei	3.000.000	4.500.000	4.500.000
6.	Juni	3.000.000	4.500.000	4.500.000
7.	Juli	3.000.000	4.500.000	4.500.000
8.	Agustus	3.000.000	4.500.000	4.500.000
9.	Septermber	3.000.000	4.500.000	4.500.000
10.	Oktober	3.000.000	4.500.000	4.500.000
11.	November	3.000.000	4.500.000	4.500.000
12.	Desember	3.000.000	4.500.000	4.500.000
Total		36.000.000	54.000.000	54.000.000
Minimum		36.000.000		
Maksimum		54.000.000		
Rata-rata		48.000.000		

Sumber:KPP Pratama Purwakarta 2018

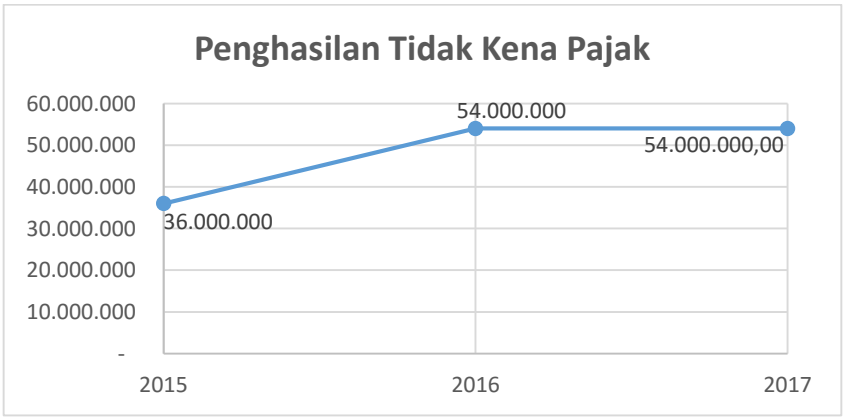
Tabel diatas menjelaskan Penghasilan Tidak Kena Pajak yang diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Purwakarta periode tahun 2015-2017 dapat dijelaskan sebagai berikut:

Pada tahun 2015 jumlah Penghasilan Tidak Kena Pajak yaitu sebesar 36.000.000. Pada tahun 2016 jumlah Penghasilan Tidak Kena Pajak yaitu sebesar 54.000.000. Pada tahun 2017 jumlah Penghasilan Tidak Kena Pajak yaitu sebesar

54.000.000. Penghasilan Tidak Kena Pajak tertinggi terjadi pada tahun 2016 dan 2017 yaitu sebesar 54.000.000 dan jumlah Penghasilan Tidak Kena Pajak terendah terjadi pada tahun 2015 yaitu sebesar 36.000.000, sedangkan rata-rata Penghasilan Tidak Kena Pajak yaitu sebesar 48.000.000.

Kebijakan pemerintah dalam menaikan Penghasilan Tidak Kena Pajak setiap tahunnya akan berimbas positif bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia. Dengan adanya kenaikan batas Penghasilan Tidak Kena Pajak maka konsumsi dalam negeri akan meningkat, daya beli masyarakat akan naik, karena biasanya uang penghasilan yang didapat dialokasikan atau dipotong untuk membayar pajak, sekarang bisa mengalokasikannya untuk dikonsumsi atau dibelanjakan.

Di bawah ini gambaran data mengenai Penghasilan Tidak Kena Pajak dalam bentuk grafik pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Purwakarta yaitu sebagai berikut:



Gambar 4.1
Grafik Penghasilan Tidak Kena Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Purwakarta Periode 2015-2017

Pada gambar grafik di atas terlihat bahwa Penghasilan Tidak Kena Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Purwakarta periode tahun 2015-2017

mengalami fluktuasi. Secara keseluruhan Penghasilan Tidak Kena Pajak yang diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Purwakarta cenderung mengalami kenaikan setiap tahunnya.

4.1.1.2 Analisis Deskriptif Pemeriksaan Pajak

Siti Kurnia Rahayu (2017:357) menjelaskan bahwa pemeriksaan pajak merupakan serangkaian kegiatan mencari, mengumpulkan, mengolah data dan/atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Indikator untuk pemeriksaan pajak adalah Surat Ketetapan Pajak (SKP) dilihat dari total pencairan pemeriksaan dari SKP (Siti Kurnia Rahayu, 2010:248).

Dibawah ini hasil pengolahan data dari Pemeriksaan Pajak yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Purwakarta pada periode tahun 2015-2017 sebagai berikut:

Tabel 4.2
Berdasarkan SKP penerimaan pemeriksaan sebelum terbit surat teguran di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Purwakarta Periode 2015-2017

NO	BULAN	TAHUN		
		2015	2016	2017
1.	Januari	Rp0	Rp0	Rp0
2.	Februari	Rp0	Rp0	Rp200.000
3.	Maret	Rp264.620.089	Rp2.002.900	Rp0
4.	April	Rp0	Rp0	Rp0
5.	Mei	Rp3.100.000	Rp0	Rp0
6.	Juni	Rp71.419.731	Rp0	Rp0
7.	Juli	Rp0	Rp0	Rp0
8.	Agustus	Rp0	Rp0	Rp1.200.000
9.	Septermber	Rp301.670.721	Rp0	Rp0
10.	Oktober	Rp0	Rp0	Rp0
11.	November	Rp8.000.000	Rp0	Rp0

12.	Desember	Rp1.427.489.159	Rp0	Rp100.000
Total		Rp2.076.299.700	Rp2.002.900	Rp1.500.000
Minimum		Rp0	Rp0	Rp0
Maksimum		Rp1.427.489.159	Rp2.002.900	Rp1.200.000
Rata-rata		Rp173.024.975	Rp166.908	Rp125.000

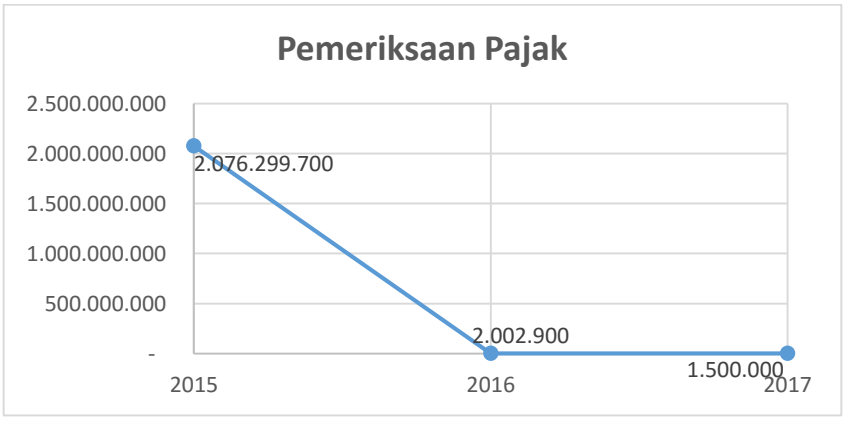
Sumber:KPP Pratama Purwakarta 2018

Tabel diatas menjelaskan Pemeriksaan Pajak yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Purwakarta periode tahun 2015-2017 dapat dijelaskan sebagai berikut:

Pada tahun 2015 Total Penerimaan Pemeriksaan Pajak berjumlah Rp2.076.299.700. Penerimaan Pemeriksaan Pajak tertinggi yaitu pada bulan Desember sebanyak Rp1.427.489.159 dan Penerimaan Pemeriksaan Pajak terendah yaitu pada bulan Januari, Februari, April, Juli, Agustus, dan Oktober, dimana di bulan-bulan tersebut tidak diterbitkan Surat Ketetapan Pajak. Pada tahun 2016 Total Penerimaan Pemeriksaan Pajak berjumlah Rp2.002.900. Pemeriksaan Pajak tertinggi yaitu pada bulan Maret sebanyak Rp2.002.900 dan Pemeriksaan Pajak terendah yaitu pada bulan Januari, Februari, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, dan Desember dimana di bulan-bulan tersebut tidak diterbitkan Surat Ketetapan Pajak. Pada tahun 2017 Total Penerimaan Pemeriksaan Pajak berjumlah Rp1.500.000. Penerimaan Pemeriksaan Pajak tertinggi yaitu pada bulan Agustus sebanyak Rp1.200.000 dan Penerimaan Pemeriksaan Pajak terendah yaitu pada bulan Januari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, September, Oktober dan November, dimana di bulan-bulan tersebut tidak diterbitkan Surat Ketetapan Pajak. Sehingga dapat disimpulkan bahwa Pemeriksaan Pajak pada KPP Pratama Purwakarta secara keseluruhan mengalami fluktuasi setiap bulannya.

Tingginya Jumlah Pemeriksaan Pajak disebabkan oleh Wajib Pajak yang memiliki hutang pajak dan sudah melunasinya, maka nilai penerimaan pemeriksaan bertambah, serta dibayarnya pajak oleh Penanggung Pajak yang sesuai dengan jangka waktu yang ditetapkan sebelum dilaksanakan penagihan pajak. Selain itu menurunnya penerimaan pemeriksaan dari SKP di tahun 2016 dan 2017 dibanding tahun 2015 dikarenakan pada tahun 2016 dan 2017 banyaknya Wajib Pajak Orang Pribadi yang melakukan *Tax Amnesty* sehingga nominal penerimaan pun menurun secara drastis. Selain itu menurunnya penerimaan Pemeriksaan Pajak karena Wajib Pajak sudah melunasi hutang pajaknya sebelum jatuh tempo sehingga tidak ada surat tagihan pajak yang diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Purwakarta.

Di bawah ini gambaran data mengenai Pemeriksaan Pajak dalam bentuk grafik pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Purwakarta yaitu sebagai berikut:



Gambar 4.2
Grafik Pemeriksaan Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Purwakarta Periode 2015-2017

Pada gambar grafik di atas terlihat bahwa Pemeriksaan Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Purwakarta pada tahun 2015-2017 mengalami fluktuasi. Secara keseluruhan Pemeriksaan Pajak yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Purwakarta mengalami penurunan setiap tahunnya.

4.1.1.3 Analisis Deskriptif Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi

Penerimaan pajak penghasilan orang pribadi merupakan sumber penerimaan yang terus-menurus yang diterima oleh pemerintah dari sektor pajak yang dikenakan kepada wajib pajak orang pribadi dalam negeri yang bertempat tinggal di indonesia, baik wajib pajak dalam kapasitasnya sebagai pemungut, sebagai pemotong, atau sebagai yang harus membayar pajak terutang tersebut. Indikator penerimaan pajak penghasilan orang pribadi yaitu target dan realisasi penerimaan penghasilan orang pribadi (John Hutagaol,2007:325).

Dibawah ini hasil pengolahan data dari perhitungan Pajak Penghasilan Orang Pribadi yang diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Purwakarta pada periode tahun 2015-2017 sebagai berikut:

Tabel 4.3
Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Purwakarta Periode 2015-2017

NO	BULAN	TAHUN		
		2015	2016	2017
1.	Januari	Rp452.466.668	Rp584.532.452	Rp1.524.876.889
2.	Februari	Rp471.235.890	Rp978.998.880	Rp1.235.437.890
3.	Maret	Rp455.697.442	Rp986.772.346	Rp955.436.678
4.	April	Rp657.368.429	Rp765.991.115	Rp1.346.317.120
5.	Mei	Rp1.545.000.000	Rp879.651.200	Rp1.477.859.000
6.	Juni	Rp1.320.000.283	Rp466.378.960	Rp1.768.977.709
7.	Juli	Rp733.444.063	Rp756.988.760	Rp1.499.654.380
8.	Agustus	Rp133.114.279	Rp890.457.988	Rp818.383.519
9.	Septermber	Rp534.721.066	Rp796.512.980	Rp987.657.880

10.	Oktober	Rp621.410.155	Rp543.721.977	Rp997.665.988
11.	November	Rp534.422.870	Rp754.125.879	Rp934.590.099
12.	Desember	Rp429.540.000	Rp645.378.000	Rp1.231.541.560
Total		Rp7.888.421.145	Rp9.049.510.537	Rp14.778.398.712
Target		Rp9.209.462.000	Rp9.209.462.000	Rp19.468.618.000
Pencapaian		86%	38%	76%
Minimum		Rp.133.114.279	Rp.466.378.960	Rp818.383.519.
Maximum		Rp.1.545.000.000	Rp.986.777.346	Rp1.768.977.709
Rata-rata		Rp657,368,429	Rp754,125,878	Rp1,231,533,226

Sumber:KPP Pratama Purwakarta 2018

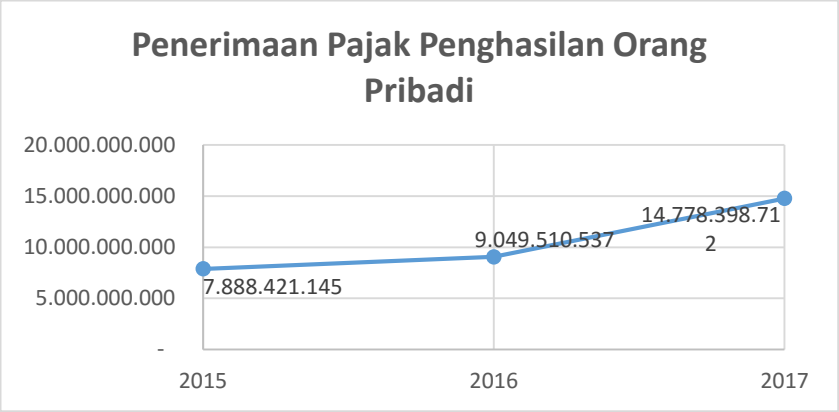
Tabel diatas menjelaskan Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Purwakarta periode tahun 2015-2017 dapat dijelaskan sebagai berikut:

Pada tahun 2015 total jumlah Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi sebesar Rp7.888.421.145 dengan penerimaan terbesar di bulan Mei sebesar Rp1.545.000.000 dan terendah pada bulan Agustus sebesar Rp133.114.279. Selanjutnya di tahun 2016 total jumlah Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi sebesar Rp9.049.510.537 dengan penerimaan tertinggi di bulan Maret sebesar Rp986.772.346 dan terendah pada bulan Juni sebesar Rp466.378.960. Kemudian di tahun 2017 total jumlah Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi sebesar Rp9.049.510.537 dengan penerimaan tertinggi di bulan Juni sebesar Rp1.768.977.709 dan terendah pada bulan Agustus sebesar Rp818.383.519.

Meningkatnya Jumlah Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi disebabkan oleh banyaknya Wajib Pajak Orang Pribadi yang membayar pajaknya sesuai jatuh tempo yang telah diberitahukan serta Wajib Pajak Orang Pribadi pun tidak melanggar aturan, sedangkan menurunnya penerimaan pajak disebabkan oleh masih banyaknya Wajib Pajak Orang Pribadi yang belum membayar

pajaknya dikarenakan Wajib Pajak Orang Pribadi melanggar sehingga diberikan sanksi ataupun Wajib Pajak Orang Pribadi cenderung melalaikan kewajibannya sehingga penerimaan pajak menurun. Sedangkan tidak tercapainya target penerimaan orang pribadi dikarenakan ada kegiatan amnesty pajak, bahan pemeriksaan khusus sedikit dan wajib pajak tidak membayar SKPKB atau STP.

Di bawah ini gambaran data mengenai Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi dalam bentuk grafik pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Purwakarta yaitu sebagai berikut:



Gambar 4.3
Grafik Pajak Penghasilan Orang Pribadi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Purwakarta Periode 2015-2017

Berdasarkan gambar 4.3 di atas dapat dilihat gambaran perkembangan Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Purwakarta dari tahun 2015 hingga tahun 2017 yang mengalami fluktuasi. Secara keseluruhan Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Purwakarta mengalami kenaikan setiap tahunnya.

4.1.2 Hasil Analisis Verifikatif

Sebagaimana telah dijelaskan pada bab sebelumnya bahwa tujuan utama penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh Perubahan Penghasilan Tidak Kena Pajak dan Tingkat Realisai Penghasilan Tidak Kena Pajak terhadap Pajak Penghasilan Orang Pribadi dengan menggunakan analisis regresi linier berganda yang terdiri dari persamaan regresi linier berganda, analisis korelasi, analisis koefisien determinasi dan pengujian hipotesis dengan terlebih dahulu dilakukan uji asumsi klasik yang terdiri dari uji normalitas, uji multikolinieritas , uji heteroskedastistias dan uji autokorelasi.

4.1.2.1 Uji Asumsi Klasik

Sebelum dilakukan pembentukan model regresi, sebelumnya dilakukan pengujian asumsi terlebih dahulu supaya model yang terbentuk memberikan estimasi yang BLUE. Pengujian asumsi ini terdiri atas tiga pengujian, yakni uji normalitas, uji multikolinieritas , uji heteroskedastistias dan uji autokorelasi.

1. Uji Normalitas

Asumsi normalitas merupakan persyaratan yang sangat penting pada pengujian kebermaknaan (signifikansi) koefisien regresi, apabila model regresi tidak berdistribusi normal maka kesimpulan dari uji t masih meragukan, karena statistik uji t pada analisis regresi diturunkan dari distribusi normal. Pengujian normalitas pada penelitian ini menggunakan uji *Kolmogorov-Smirnov*. Jika probabilitas yang di lihat dari. nilai *Asymp Sig*. > 0.05, maka dapat disimpulkan bahwa residual dalam model berdistribusi secara normal. Dengan menggunakan program SPSS 25.0, diperoleh hasil uji *Kolmogorov-Smirnov* sebagai berikut.

Tabel 4.4
Uji Normalitas Data
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

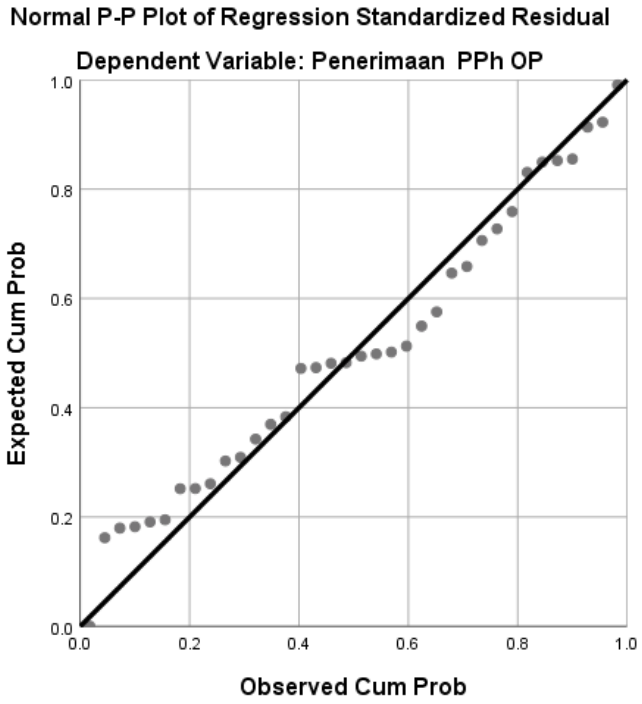
		Unstandardized Residual
N		36
Normal Parameters[a,b]	Mean	-.0000001
	Std. Deviation	321046313.45426430
Most Extreme Differences	Absolute	.127
	Positive	.098
	Negative	-.127
Test Statistic		.127
Asymp. Sig. (2-tailed)		.150[c]

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.

Pada tabel *output* SPSS di atas, dapat dilihat bahwa nilai probabilitas yang di lihat dari nilai *Asymp Sig.* adalah sebesar 0,150 dan nilai tersebut lebih besar dari 0,05, maka sesuai dengan kriteria pengujian dapat disimpulkan bahwa residual dalam model regresi berdistribusi secara normal, sehingga model telah memenuhi salah satu syarat untuk dilakukan pengujian regresi. Adapun secara visual gambar grafik normal *probability plot* dapat dilihat pada Gambar 4.4 berikut:



Gambar 4.4
Grafik Normalitas

Grafik di atas mempertegas bahwa model regresi yang diperoleh berdisitribusi normal, dimana sebaran data berada di sekitar garis diagonal.

2. Uji Multikolinieritas

Uji multikolinieritas bertujuan untuk mengetahui ada tidaknya multikolinieritas antar variabel bebas. Model regresi yang baik seharusnya adalah yang tidak terjadi multikolinieritas atau tidak terjadi korelasi di antara variabel bebas. Cara untuk mendeteksi tidak adanya multikolinieritas adalah dengan cara melihat tabel VIF (*Variance Inflation Factor*) harus kurang dari 10 dan nilai *tolerance* harus lebih dari 0,1. Dari hasil pengujian dengan menggunakan SPSS, diperoleh hasil sebagai berikut:

Tabel 4.5
Hasil Uji Multikolinieritas

Coefficients[a]

Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	Penghasilan Tidak Kena Pajak	.928	1.078
	Pemeriksaan Pajak	.928	1.078

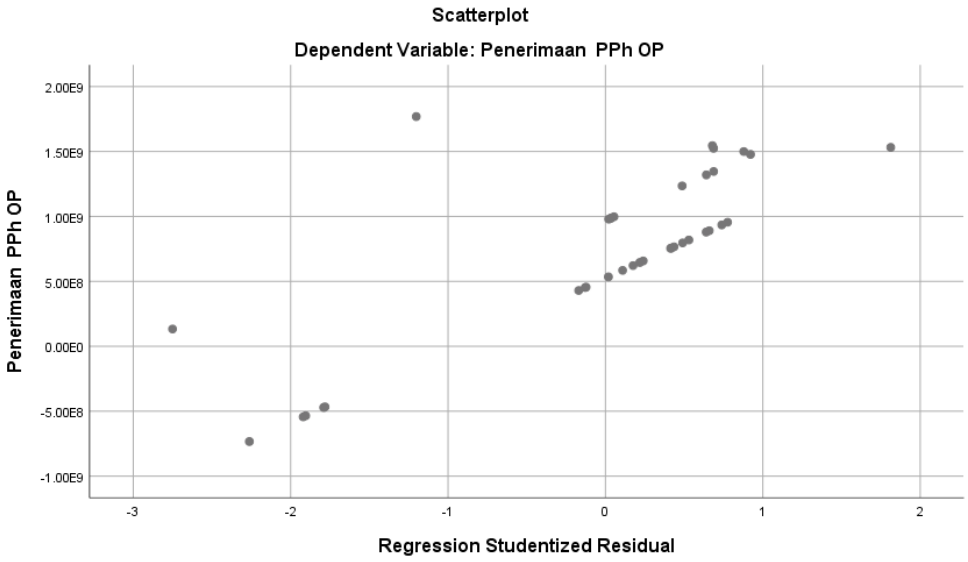
a. Dependent Variable: Penerimaan PPh OP

Berdasarkan nilai VIF yang diperoleh seperti terlihat pada tabel 4.5 di atas menunjukkan tidak ada korelasi yang cukup kuat antara sesama variabel bebas. Hal tersebut dapat dilihat dari besaran *tolerance* (α) dan *variance inflation factor* (VIF) jika menggunakan *alpha/tolerance* = 10% atau 0,10 maka VIF = 10. Dari hasil output VIF hitung dari kedua variabel yaitu sebesar 1,078 lebih kecil dari 10 dan semua *tolerance* variabel bebas memiliki nilai sebesar 0,928 = 92,8% lebih besar dari 10%, maka dapat disimpulkan tidak terdapat multikolinieritas diantara variabel Penghasilan Tidak Kena Pajak dan Pemeriksaan Pajak.

3. Uji Heteroskedastisitas

Dalam persamaan regresi berganda perlu juga diuji mengenai sama atau tidak varian dari residual dari observasi yang satu dengan observasi yang lain. Analisis uji asumsi heteroskedastisitas hasil *output* SPSS melalui grafik *scatterplot* antara Z *prediction* (ZPRED) yang merupakan variabel bebas (sumbu X = Y hasil prediksi) dan nilai residualnya (SRESID) merupakan variabel terikat (sumbu Y = $Y_{prediksi} - Y_{riil}$). Homoskedastisitas terjadi jika pada *scatterplot* titik-titik hasil pengolahan data antara ZPRED dan SRESID menyebar dibawah maupun diatas titik origin (angka 0) pada sumbu Y dan tidak mempunyai pola

yang teratur. Heteroskedastisitas terjadi jika pada *scatterplot* titik-titiknya mempunyai pola yang teratur baik menyempit, melebar, maupun bergelombang-gelombang (Danang Sunyoto, 2013: 90).



Gambar 4.5
Grafik Scatterplots

Pada Gambar 4.5 terlihat bahwa titik-titik menyebar secara acak serta tersebar baik di atas maupun di bawah angka 0 pada sumbu Y. Hal ini dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedasitas pada model regresi, karena tidak ada pola yang jelas serta titik-titik yang menyebar diatas dan dibawah angka nol pada sumbu Y, sehingga model regresi layak untuk digunakan.

4. Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi bertujuan menguji apakah dalam model regresi linear ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode t-1 (sebelumnya). Jika terjadi korelasi, maka dinamakan ada problem autokorelasi. Pada pengujian autokorelasi digunakan uji *Durbin-*

Watson untuk mengetahui ada tidaknya autokorelasi pada model regresi dan berikut nilai *Durbin-Watson* yang diperoleh melalui hasil estimasi model regresi.

Tabel 4.6
Uji Autokorelasi

Model Summary[b]

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.592[a]	.350	.311	330631889.898 54	1.795

a. Predictors: (Constant), Pemeriksaan Pajak, Penghasilan Tidak Kena Pajak

b. Dependent Variable: Penerimaan PPh OP

Berdasarkan tabel di atas hasil pengolahan diperoleh nilai statistik *Durbin-Watson* (D-W) sebesar 1,795. Karena nilai *Durbin-Watson* model regresi pada hasil pengolahan sebesar 1,795 dimana nilai *Durbin-Watson* berada di antara -2 sampai 2, maka disimpulkan bahwa model regresi tidak terdapat autokorelasi. Karena keempat asumsi regresi sudah terpenuhi, maka dapat disimpulkan bahwa hasil estimasi model regresi sudah memenuhi syarat BLUE *(Best Linear Unbias Estimation)* sehingga dikatakan kesimpulan yang diperoleh dari model regresi sudah menggambarkan keadaan yang sebenarnya

4.1.2.2 Persamaan Regresi Linier Berganda

Model persamaan regresi linier berganda yang akan dibentuk adalah sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \varepsilon$$

(Sumber : Sugiyono, 2012:216)

Keterangan :
Y = Pajak Penghasilan Orang Pribadi
X_1 = Penghasilan Tidak Kena Pajak

X_2 = Pemeriksaan Pajak
α = Konstanta Intersep
β_1 = Koefisien regresi variabel Penghasilan Tidak Kena Pajak
β_2 = Koefisien regresi variabel Pemeriksaan Pajak
ε = Tingkat kesalahan (*error term*)

Berdasarkan hasil pengolahan data dengan menggunakan SPSS, diperoleh hasil sebagai berikut:

Tabel 4.7
Persamaan Regresi Linier Berganda

Coefficients[a]

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		
		B	Std. Error	Beta	t	Sig.
1	(Constant)	1495744592	283819748.129		5.270	.000
	Penghasilan Tidak Kena Pajak	-164.508	70.086	-.342	-2.347	.025
	Pemeriksaan Pajak	.652	.238	.400	2.743	.010

a. Dependent Variable: Penerimaan PPh OP

Dari tabel *output* di atas diperoleh nilai a sebesar 1.495.744.592 β_1 sebesar -164,508 dan β_2 sebesar 0,652 Dengan demikian, persamaan regresi linier berganda yang akan dibentuk adalah sebagai berikut:

$$Y= 1.495.744.592 - 164,508 (X_1) + 0,652 (X_2)$$

Dari hasil persamaan regresi linier berganda tersebut masing-masing variabel dapat diinterpretasikan sebagai berikut:

a. Konstanta sebesar 1.495.744.592; artinya jika Penghasilan Tidak Kena Pajak dan Pemeriksaan Pajak nilainya adalah 0, maka Pajak Penghasilan Orang Pribadi nilainya adalah 1.495.744.592.
b. Koefisien regresi variabel Penghasilan Tidak Kena Pajak (X_1) sebesar -164,508; artinya jika variabel independen lain nilainya tetap dan

Penghasilan Tidak Kena Pajak mengalami kenaikan 1%, maka Pajak Penghasilan Orang Pribadi (Y) akan mengalami penurunan sebesar 164,508. Koefisien bernilai negatif artinya terjadi hubungan negatif antara Penghasilan Tidak Kena Pajak dengan Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi, semakin tinggi Penghasilan Tidak Kena Pajak maka Pajak Penghasilan Orang Pribadi akan semakin rendah.

c. Koefisien regresi variable Pemeriksaan Pajak (X_2) sebesar 0,652; artinya jika variabel independen lain nilainya tetap dan Pemeriksaan Pajak mengalami kenaikan 1%, maka Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi (Y) akan mengalami peningkatan sebesar 0,652. Koefisien bernilai positif artinya terjadi hubungan positif antara Pemeriksaan Pajak dengan Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi, semakin tinggi Penerimaan Pemeriksaan Pajak maka Pajak Penghasilan Orang Pribadi semakin tinggi.

4.1.3 Analisis Korelasi

Analisis korelasi bertujuan untuk mengukur kekuatan asosiasi (hubungan) linier antara variabel independen dengan variabel dependen. Dalam hal ini digunakan untuk melihat hubungan antara Penghasilan Tidak Kena Pajak dan Pemeriksaan Pajak dengan Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi.

4.1.3.1 Analisis Korelasi Pearson

Dengan menggunakan SPSS 25.0, diperoleh hasil analisis korelasi pearson antara Penghasilan Tidak Kena Pajak dan Pemeriksaan Pajak dengan Pajak Penghasilan Orang Pribadi sebagai berikut:

1) Analisis Korelasi Penghasilan Tidak Kena Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi

Untuk mengetahui keeratan hubungan antara Penghasilan Tidak Kena Pajak terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi digunakan analisis korelasi pearson. Dengan menggunakan program SPSS 25.0, diperoleh hasil korelasi antara Penghasilan Tidak Kena Pajak dengan Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi ketika Pemeriksaan Pajak tidak berubah dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.8
Hasil Korelasi Pearson Penghasilan Tidak Kena Pajak dengan Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi

Correlations

		Penghasilan Tidak Kena Pajak	Penerimaan PPh OP
Penghasilan Tidak Kena Pajak	Pearson Correlation	1	-.450**
	Sig. (2-tailed)		.006
	N	36	36
Penerimaan PPh OP	Pearson Correlation	-.450**	1
	Sig. (2-tailed)	.006	
	N	36	36

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Berdasarkan tabel di atas, hubungan antara Penghasilan Tidak Kena Pajak dengan Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi ketika Pemeriksaan Pajak tidak berubah adalah sebesar -0,450, artinya Penghasilan Tidak Kena Pajak memilki hubungan sedang dengan Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi. Hal ini terlihat dari nilai korelasi berada diantara 0,40 hingga 0,599 yang

tergolong dalam kategori sedang. Hubungan yang bersifat negatif artinya, setiap kenaikan Penghasilan Tidak Kena Pajak maka hal tersebut akan menurunkan Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi dan begitupun sebaliknya.

2) Analisis Korelasi Pemeriksaan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi

Untuk mengetahui keeratan hubungan antara Pemeriksaan Pajak terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi digunakan analisis korelasi pearson. Dengan menggunakan program SPSS 25.0, diperoleh hasil korelasi antara Pemeriksaan Pajak dengan Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi ketika Penghasilan Tidak Kena Pajak tidak berubah dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.9
Hasil Korelasi Parsial Pemeriksaan Pajak dengan Pajak Penghasilan Orang Pribadi

Correlations

		Pemeriksaan Pajak	Penerimaan PPh OP
Efektivitas Pemeriksaan Pajak	Pearson Correlation	1	.492**
	Sig. (2-tailed)		.002
	N	36	36
Penerimaan PPh OP	Pearson Correlation	.492**	1
	Sig. (2-tailed)	.002	
	N	36	36

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Berdasarkan tabel di atas, hubungan antara Pemeriksaan Pajak dengan Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi ketika Penghasilan Tidak Kena Pajak tidak berubah adalah sebesar 0,492, artinya Pemeriksaan Pajak memilki hubungan sedang dengan Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi. Hal ini terlihat dari nilai korelasi berada diantara 0,40 hingga 0,599 yang tergolong dalam

kategori sedang. Hubungan yang bersifat positif artinya, setiap kenaikan Penerimaan Pemeriksaan Pajak maka hal tersebut akan meningkatkan Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi dan begitupun sebaliknya.

4.1.4 Analisis Koefisien Determinasi

1) Koefisien Determinasi Penghasilan Tidak Kena Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi

Untuk mengetahui pengaruh Penghasilan Tidak Kena Pajak terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi dapat dilihat melalui Koefisien Determinasi. Besarnya koefisien determinasi dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$Kd = r^2 \times 100\%$$

(Umi Narimawati, 2010:50)

Keterangan :

Kd = Koefisien Determinasi
r^2 = Koefisien Korelasi

Berdasarkan tabel 4.11 maka diperoleh nilai koefisien determinasi parsial dari variabel Penghasilan Tidak Kena Pajak terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi sebagai berikut:

$Kd = (0{,}450)^2 \times 100\%$

$= 20{,}25\%,$

Berdasarkan perhitungan di atas, terlihat bahwa pengaruh variabel Penghasilan Tidak Kena Pajak terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi yaitu sebesar 20,25%, sedangkan sisanya sebesar 79,75% merupakan

pengaruh yang diberikan oleh faktor lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini seperti kepatuhan wajib pajak, sistem pemungutan, kesadaran Wajib Pajak, pelaksanaan administrasi pajak, dan lain-lain.

2) Koefisien Determinasi Pemeriksaan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi

Besarnya koefisien determinasi dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$Kd = r^2 \times 100\%$$

(Umi Narimawati, 2010:50)

Keterangan :

Kd = Koefisien Determinasi
r^2 = Koefisien Korelasi

Berdasarkan table 4.12 maka diperoleh nilai koefisien determinasi parsial dari variabel Pemeriksaan Pajak terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi sebagai berikut:

$Kd = (0{,}492)^2 \times 100\%$

$= 24{,}2\%,$

Berdasarkan perhitungan di atas, terlihat bahwa pengaruh variabel Pemeriksaan Pajak terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi yaitu sebesar 24,2%, sedangkan sisanya sebesar 75,8% merupakan pengaruh yang diberikan oleh faktor lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini seperti kepatuhan wajib pajak, sistem pemungutan, kesadaran Wajib Pajak, pelaksanaan administrasi pajak, dan lain-lain.

4.1.5 Pengujian Hipotesis

Uji statistik yang digunakan untuk menguji hipotesis secara parsial adalah uji t. Rumusan hipotesis parsial yang akan diuji adalah sebagai berikut:

4.1.5.1 Pengujian Hipotesis Parsial (Uji t)

1. Pengujian Hipotesis Parsial Penghasilan Tidak Kena Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi

$H_0 : \beta_1 = 0$ Artinya, secara parsial Penghasilan Tidak Kena Pajak tidak berpengaruh terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi.

$H_1 : \beta_1 = 0$ Artinya, secara parsial Penghasilan Tidak Kena Pajak berpengaruh terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi.

Kriteria : Tolak H_0 jika t hitung lebih besar dari t tabel atau -t hitung lebih kecil dari -t tabel, terima dalam hal lainnya.

Dengan menggunakan SPSS, diperoleh hasil uji hipotesis parsial X_1 sebagai berikut:

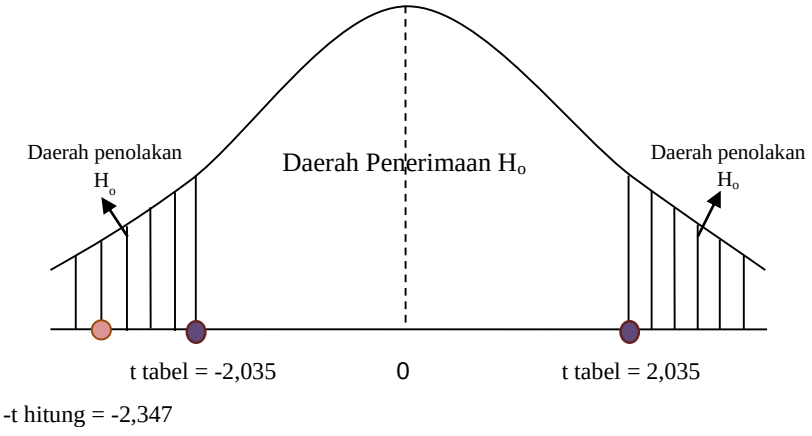
Tabel 4.10
Pengujian Hipotesis Parsial Pengujian Hipotesis Penghasilan Tidak Kena Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi

Coefficients[a]

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		
		B	Std. Error	Beta	t	Sig.
1	(Constant)	1495744592	283819748.129		5.270	.000
	Penghasilan Tidak Kena Pajak	-164.508	70.086	-.342	-2.347	.025
	Pemeriksaan Pajak	.652	.238	.400	2.743	.010

a. Dependent Variable: Penerimaan PPh OP

Dari *output SPSS* diatas diperoleh nilai t_{hitung} untuk Penghasilan Tidak Kena Pajak (X_1) sebesar -2,347. Dengan tingkat signifikan (α) sebesar 5%, dan derajat kebebasan (df) = N -K-1, atau 36-2-1= 33, maka diperoleh nilai $-t_{tabel}$ sebesar -2,035. Sehingga dapat disimpulkan nilai $-t_{hitung} < -t_{tabel}$ (-2,347 < -2,035) dan dapat disimpulkan bahwa H_o ditolak dan H_1 diterima. Hasil ini juga ditunjukkan oleh nilai signifikansi uji statistik untuk variabel Penghasilan Tidak Kena Pajak sebesar 0,025, artinya kesalahan untuk mengatakan ada pengaruh terhadap Pajak Penghasilan Orang Pribadi sebesar 2,5% atau berarti lebih kecil dari tingkat kesalahan yang dapat di terima sebesar 5% sehingga dapat diputuskan untuk menolak H_o. Kesimpulannya, Penghasilan Tidak Kena Pajak berpengaruh signifikan terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Purwakarta. Untuk mempermudah dalam memahami hasil uji hipotesis, maka digambarkan daerah penolakan dan penerimaan H_o sebagai berikut:



Gambar 4.6
Kurva Hipotesis Parsial Pengujian Hipotesis Penghasilan Tidak Kena Pajak Terhadap Pajak Penghasilan Orang Pribadi

2. Pengujian Hipotesis Parsial Pemeriksaan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi

$H_0 : \beta_2 = 0$ Artinya, secara parsial Pemeriksaan Pajak tidak berpengaruh terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi.

$H_1 : \beta_2 = 0$ Artinya, secara parsial Pemeriksaan Pajak berpengaruh terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi.

Kriteria : Tolak H_0 jika t hitung lebih besar dari t tabel atau -t hitung lebih kecil dari -t tabel, terima dalam hal lainnya.

Dengan menggunakan SPSS, diperoleh hasil uji hipotesis parsial X_2 sebagai berikut:

Tabel 4.11
Pengujian Hipotesis Parsial Pemeriksaan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi

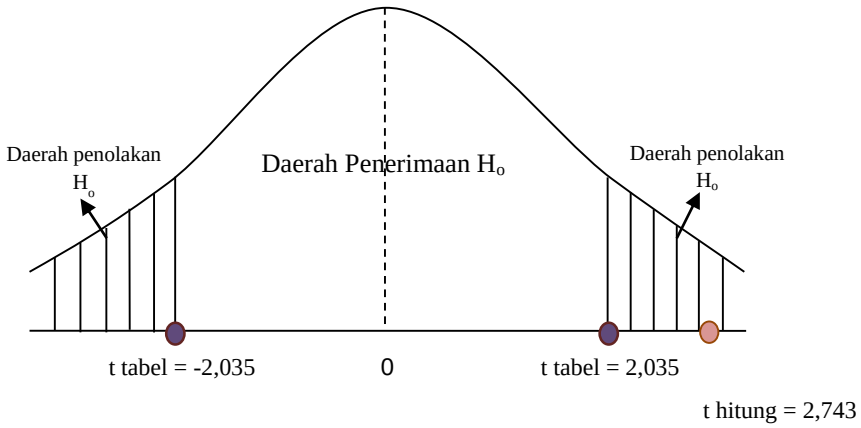
Coefficients[a]

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		
		B	Std. Error	Beta	t	Sig.
1	(Constant)	1495744592	283819748.129		5.270	.000
	Penghasilan Tidak Kena Pajak	-164.508	70.086	-.342	-2.347	.025
	Pemeriksaan Pajak	.652	.238	.400	2.743	.010

a. Dependent Variable: Penerimaan PPh OP

Dari *output SPSS* diatas diperoleh nilai t_{hitung} untuk Penghasilan Tidak Kena Pajak (X_1) sebesar 2,743. Dengan tingkat signifikan (α) sebesar 5%, dan derajat kebebasan (df) = N -K-1, atau 36-2-1= 33, maka diperoleh nilai t_{tabel} sebesar 2,035. Sehingga dapat disimpulkan nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ (2,743 > 2,035) dan

dapat disimpulkan bahwa H_o ditolak dan H_1 diterima. Hasil ini juga ditunjukkan oleh nilai signifikansi uji statistik untuk variabel Penghasilan Tidak Kena Pajak sebesar 0,010, artinya kesalahan untuk mengatakan ada pengaruh terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi sebesar 1% atau berarti lebih kecil dari tingkat kesalahan yang dapat di terima sebesar 5% sehingga dapat diputuskan untuk menolak H_o. Kesimpulannya, Pemeriksaan Pajak berpengaruh signifikan terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Purwakarta. Untuk mempermudah dalam memahami hasil uji hipotesis, maka digambarkan daerah penolakan dan penerimaan H_o sebagai berikut:



Gambar 4.7
Kurva Hipotesis Parsial Pemeriksaan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi

4.2 Pembahasan

4.2.1 Pengaruh Penghasilan Tidak Kena Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi

Penghasilan Tidak Kena Pajak pada KPP Pratama Purwakarta secara keseluruhan mengalami fluktuasi setiap bulannya. Kebijakan pemerintah dalam menaikan Penghasilan Tidak Kena Pajak setiap tahunnya akan berimbas positif bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia. Dengan adanya kenaikan batas Penghasilan Tidak Kena Pajak maka konsumsi dalam negeri akan meningkat, daya beli masyarakat akan naik, karena biasanya uang penghasilan yang didapat dialokasikan atau dipotong untuk membayar pajak, sekarang bisa mengalokasikannya untuk dikonsumsi atau dibelanjakan. Adapun dari hasil penelitian yang telah dilakukan didapatkan nilai korelasi antara Penghasilan Tidak Kena Pajak terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi yaitu tergolong dalam kategori sedang. Hubungan yang bersifat negative artinya setiap kenaikan Penghasilan Tidak Kena Pajak maka akan menurunkan Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi. Perubahan PTKP yang menunjukkan peningkatan dapat menurunkan Penerimaan Negara dari sektor pajak penghasilan orang pribadi. (Siti Kurnia Rahayu, 2017:183). Selain itu menurut Etty Muyassaroh (2012:42), besaran penghasilan tidak kena pajak mempengaruhi penerimaan pajak penghasilan, karena dengan kenaikan besaran pendapatan tidak kena pajak mempersulit kenaikan perolehan pajak penghasilan.

Kemudian besar presentase pengaruh Penghasilan Tidak Kena Pajak terhadap Pajak Penghasilan Orang Pribadi yaitu sebesar 20,25%. Dilihat dari hasil

tersebut, maka pengaruh Penghasilan Tidak Kena Pajak terhadap Pajak Penghasilan Orang Pribadi kurang dominan. Artinya terdapat faktor lain sebesar 79,75% yang dapat mempengaruhi Pajak Penghasilan Orang Pribadi seperti, kepatuhan wajib pajak, sistem pemungutan, kesadaran Wajib Pajak, pelaksanaan administrasi pajak, dan lain-lain.

Kondisi tersebut membuktikan dan menjawab fenomena yang telah dikemukakan sebelumnya yaitu pada tahun 2015 - 2017 KPP Pratama Purwakarta mengalami kenaikan Penghasilan Tidak Kena Pajak, tetapi tidak diikuti dengan penurunan Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi, seharusnya dengan meningkatnya Penghasilan Tidak Kena Pajak, maka Pencapaian Target Penerimaan Pajak Penghasilan akan menurun. Kondisi ini disebabkan karena ada kenaikan jumlah wajib pajak terdaftar di KPP Pratama Purwakarta pada tahun 2016 dan 2017.Dengan hasil ini menunjukan bahwa faktor lain lebih dominan mempengaruhi Pajak Penghasilan Orang Pribadi dibandingkan dengan Penghasilan Tidak Kena Pajak, faktor lain tersebut seperti jumlah wajib pajak naik,kepatuhan wajib pajak, sistem pemungutan, kesadaran Wajib Pajak, pelaksanaan administrasi pajak, dan lain-lain.

Penelitian mengenai Penghasilan Tidak Kena Pajak terhadap penerimaan pajak penghasilan yang telah dilakukan oleh Michel Salim dan Lili Syafitri (2015), serta Yeti Apriliawati dan Setiawan (2017) menyatakan bahwa Penghasilan Tidak Kena Pajak berpengaruh signifikan terhadap Pajak Penghasilan Orang Pribadi.

4.2.2 Pengaruh Pemeriksaan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi

Pemeriksaan Pajak pada KPP Pratama Purwakarta secara keseluruhan mengalami fluktuasi setiap bulannya. Tingginya Jumlah Pemeriksaan Pajak disebabkan oleh Wajib Pajak yang memiliki hutang pajak dan sudah melunasinya, maka nilai penerimaan pemeriksaan bertambah, serta dibayarnya pajak oleh Penanggung Pajak yang sesuai dengan jangka waktu yang ditetapkan sebelum dilaksanakan penagihan pajak. Selain itu menurunnya penerimaan pemeriksaan dari SKP di tahun 2016 dan 2017 dibanding tahun 2015 dikarenakan pada tahun 2016 dan 2017 banyaknya Wajib Pajak Orang Pribadi yang melakukan *Tax Amnesty* sehingga nominal penerimaan pun menurun secara drastis. Selain itu menurunnya penerimaan Pemeriksaan Pajak karena Wajib Pajak sudah melunasi hutang pajaknya sebelum jatuh tempo sehingga tidak ada surat tagihan pajak yang diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Purwakarta.

Adapun dari hasil penelitian yang telah dilakukan didapatkan nilai korelasi antara Pemeriksaan Pajak terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi yaitu tergolong dalam kategori sedang. Hubungan yang bersifat positif artinya setiap kenaikan jumlah Penerimaan Pemeriksaan Pajak maka akan meningkatkan Pajak Penghasilan Orang Pribadi. Pemeriksaan pajak meningkatkan kepatuhan wajib pajak sebagai konsekuensi pemungutan pajak di Indonesia, secara tidak langsung menjadi aspek pendorong untuk meningkatkan penerimaan negara dari sektor pajak (Siti Kurnia Rahayu, 2010:248).

Kemudian besar presentase pengaruh Pemeriksaan Pajak terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi yaitu sebesar 24,2%. Dilihat dari hasil tersebut, maka pengaruh Pemeriksaan Pajak terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi kurang dominan. Artinya terdapat faktor lain sebesar 75,8% yang dapat mempengaruhi Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi seperti, kepatuhan wajib pajak, sistem pemungutan, kesadaran Wajib Pajak, pelaksanaan administrasi pajak, dan lain-lain.

Kondisi tersebut membuktikan dan menjawab fenomena yang telah terjadi yaitu Pemeriksaan pajak dari tahun ke tahun menurun drastis sehingga pencapaian target penerimaan pajak penghasilan orang pribadi tidak tercapai. Penurunan penerimaan pemeriksaan disebabkan oleh banyaknya wajib pajak yang mengikuti *tax amnesty* sehingga penerimaan pemeriksaan menurun drastis. Dengan hasil ini menunjukan bahwa faktor lain lebih dominan mempengaruhi Pajak Penghasilan Orang Pribadi dibandingkan dengan Pemeriksaan Pajak, faktor lain tersebut seperti kepatuhan wajib pajak, sistem pemungutan, kesadaran Wajib Pajak, pelaksanaan administrasi pajak, dan lain-lain.

Penelitian mengenai Pemeriksaan Pajak terhadap Pajak Penghasilan Orang Pribadi yang telah dilakukan oleh Maria M. Ratna Sari, Ni Nyoman Afrianti (2012), dan Devi Septya Anggraini, Mochammad Al Musadieq, Dwiatmanto (2016) yang menyatakan bahwa Pemeriksaan Pajak berpengaruh signifikan terhadap Pajak Penghasilan Orang Pribadi.